

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG PENULISAN

Sektor pariwisata menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sebagian besar warga dunia seiring dengan perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi serta pertumbuhan ekonomi global. Pariwisata memberikan kontribusi besar bagi peningkatan devisa suatu negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan baru dan mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.<sup>1</sup> Tingginya animo wisatawan dapat ditunjukkan melalui grafik kunjungan wisata yang cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2030, jumlah kunjungan perjalanan wisata akan mencapai lebih dari 1.8 miliar orang.<sup>2</sup> Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi global serta perluasan pasar bagi sektor pariwisata.

Dalam konteks global, pariwisata menjadi salah satu sektor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka akses peluang pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan data yang dihimpun *World Tourism Organization (UNWTO)*, pada *International Tourism Highlights 2020 Edition*, sektor pariwisata mengalami pertumbuhan yang konstan selama satu dekade terakhir terhitung sejak 2010 sampai 2019. Satu tahun sebelum pandemi Covid-19, pariwisata global bertumbuh sebesar 4% dengan total 1.45 miliar perjalanan dengan perputaran uang 1.48 triliun dolar AS.<sup>3</sup> Data ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian dunia dan tentunya berdampak signifikan bagi negara-negara yang sedang mengembangkan sektor pariwisata sebagai poros ekonomi baru.

---

<sup>1</sup> Andreas Hugo Pareira, "Peran Strategis Pariwisata dalam Politik Pembangunan Indonesia", dalam Martin Chen dan Frans Nala, (ed.), *Peziarah di Bumi-Gereja dan Pariwisata Holistik* (Jakarta: Obor, 2023), hlm. 36.

<sup>2</sup> United Nations World Tourism Organization (UNWTO), "UNWTO World Tourism Barometer", *E-Library* 17:4 (November, 2019), pp. 1–44.

<sup>3</sup> United Nations World Tourism Organization (UNWTO), "International Tourism Highlights 2020", *E-Library* 18:4 (Juli, 2020) p. 23.

Untuk konteks Indonesia, sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kunjungan wisata setiap tahun baik dari luar negeri maupun kunjungan dari wisatawan dalam negeri. Hal itu cukup beralasan, mengingat Indonesia kaya akan keindahan alam, budaya, dan seni yang menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Berdasarkan data tahun 2019 yang dihimpun UNWTO, Indonesia mengalami pertumbuhan kunjungan pariwisata sebesar 9%, dengan 15,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara yang menghasilkan devisa sebesar 16,9 miliar dolar AS, dengan rata-rata pengeluaran wisatawan sebesar 1.090 dolar AS per kapita.<sup>4</sup> Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan, Presiden Joko Widodo menetapkan sepuluh Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau yang jamak dikenal sebagai daerah wisata “10 Bali Baru”. Tidak berhenti sampai di sana, pemerintah Republik Indonesia juga telah menetapkan lima Kawasan KSPN Super Prioritas yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Likupang di Sulawesi Utara dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur.<sup>5</sup>

Pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber ekonomi baru tentunya menimbulkan beragam efek. Secara positif, pariwisata berdampak terhadap akselerasi pembangunan di suatu daerah. Studi Leiper dalam Pitana dan Ketut menunjukkan industri pariwisata berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, menyehatkan neraca perdagangan dan membuka ruang berwirausaha.<sup>6</sup> Berdasarkan data UNWTO pada tahun 2009, sektor pariwisata menyumbang penerima devisa terbesar ketiga setelah minyak dan gas bumi serta kepala sawit. Dari sisi kultural, industri pariwisata dapat mendorong pemeliharaan produk-produk kebudayaan, mendorong usaha, melestarikan dan menghidupkan kekayaan budaya tradisional seperti kesenian, kerajinan tangan, tarian, musik, ritual budaya dan pakaian adat.<sup>7</sup> Selain itu, pembangunan pariwisata mampu berkontribusi secara nyata dalam

---

<sup>4</sup> United Nations World Tourism Organization (UNWTO), "Tourism Enjoys Strong Start to 2022 While Facing New Uncertainties", *E-Library* 17:4 (November, 2022), p. 25.

<sup>5</sup> Emir Yanwardhana, "Destinasi Wisata Prioritas Raup Investasi US\$ 435,5 Juta", dalam *CNBC Indonesia*, 28 November 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news.20220909095451-4-370656/5-destinasi-wisata-prioritas-raup-investasi-us-4355-juta>, diakses 20 November 2023.

<sup>6</sup> Pitana dan Ketut, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Jakarta: Andy, 2009), hlm. 12.

<sup>7</sup> Djahur Hamid dan Topowijono Akhmad Bories Yasin Abdillah, "Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal Di Kawasan Wisata (Studi Pada Masyarakat Sekitar Wendit, Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis* 30:1 (Malang: Januari 2016), hlm. 74–78.

upaya-upaya konservasi budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. Pada tahun 2002, resolusi bersama UNESCO dan UN-WTO telah menetapkan kegiatan pariwisata sebagai sarana utama pelestarian kebudayaan.<sup>8</sup>

Pariwisata super premium Labuan Bajo memiliki efek yang positif. Popularitas Labuan Bajo semakin meningkat setelah pemerintah melakukan pengembangan infrastruktur pariwisata. Implikasi dari popularitas tersebut ialah lonjakan wisata yang masif sebelum pandemi. Pada tahun 2019, BPOLBF menyebutkan kunjungan wisata mencapai 221.700 orang. Angka kunjungan tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni 176.800 orang pada tahun 2018 dan 125.100 pada tahun 2017. Tingginya kunjungan wisatawan tersebut berdampak pada perekonomian daerah. Salah satunya dari sumbangan sektor akomodasi dan makan minum pada Produk Domestik Bruto (PDB) Kabupaten Manggarai Barat yang mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2016-2019, pertumbuhan sektor hotel dan pariwisata berkisar di angka 11 hingga 12 persen. Pencapaian ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berkisar pada angka 6 persen pada 2011-2015.<sup>9</sup>

Pariwisata super premium Labuan Bajo mendorong pembangunan infrastruktur yang masif di Labuan, antara lain perluasan Bandar Komodo Labuan Bajo, pembangunan Terminal Multipurpose Wae Kelambu, pembangunan wisata eksekutif di Golo Mori. Selain itu, pemerintah telah memperbaiki kualitas jalan, menyediakan air bersih, menata puncak Waringin sebagai pusat souvenir, penataan Goa Batu Cermin, penataan Taman Nasional Komodo dan pembangunan kawasan Marina Labuan Bajo yang mengadopsi konsep *waterfront city*. Pelbagai bentuk pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk menyambut wisatawan. Dalam visi BPOLBF, pembangunan ini menargetkan kunjungan wisatawan mencapai 500.000 dan menyumbang sekitar 8 triliun setiap tahun untuk daerah Kabupaten Manggarai Barat.

---

<sup>8</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Pariwisata dan Pembangunan Sektor Wisata", dalam *Kememparekraf.go.id*, [http://kemenpar.go.id/userfiles/file/440\\_1257](http://kemenpar.go.id/userfiles/file/440_1257), diakses pada 28 November 2022.

<sup>9</sup> Debora Laksmi Indraswari, "Menanti Hasil Transformasi Labuan Bajo sebagai Destinasi Wisata Superprioritas", *Kompas*, 7 Januari 2023.

Berbarengan dengan dampak positif tersebut, industri pariwisata membawa implikasi destruktif yang masif dan sistematis. Pariwisata telah memperparah deforestasi, merusak keseimbangan ekosistem, mendegradasi budaya lokal dan mereproduksi ketimpangan ekonomi.<sup>10</sup> Berbagai dampak negatif industri pariwisata tersebut telah nyata dirasakan oleh masyarakat lokal di sekitar wilayah pengembangan wisata super premium Labuan Bajo. Di tengah gegap gempita pengembangan wisata super premium, nasib masyarakat lokal dikorbankan. Studi Timothy dan Tosun membuktikan bahwa pengambilan aset tanah masyarakat lokal di Labuan sangat masif terjadi. Sebagian besar pemodal asing dan pengusaha transnasional telah memprivatisasi tanah-tanah di kota Labuan Bajo. Masyarakat lokal telah menjadi orang asing di tanah leluhurnya sendiri.<sup>11</sup>

Atas nama konservasi dan investasi, pemerintah membatasi ruang lingkup warga di pulau Komodo. Masyarakat Pulau Komodo yang berpenduduk 2.000 jiwa hanya mendiami wilayah sekitar 17 hektar saja.<sup>12</sup> Sebagian besar wilayah telah diprivatisasi sebagai kawasan bisnis pariwisata. Padahal, masyarakat Komodo yang dikenal sebagai “*Ata Modo*” sudah mendiami pulau ini ratusan tahun sebelum penetapan pulau sebagai kawasan lindung oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1915 dan sebagai Taman Nasional oleh pemerintah Indonesia pada 1980.<sup>13</sup> Taman Nasional Komodo sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta sejak tahun 2005. Semenjak diserahkan kepada pihak swasta, Taman Nasional Komodo mengalami pergeseran fungsi dari model konservasi menjadi privatisasi yang memunculkan klaim beberapa pihak atas kepemilikan pribadi Taman Nasional Komodo.<sup>14</sup>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan dua kali perubahan kawasan zonasi di Taman Nasional Komodo. Perubahan itu

---

<sup>10</sup> Sapta Nirwandar dan Frans Teguh, *Kepariwisata NTT Menuju Kelas Dunia* (Jakarta: Kompas, 2020), hlm. xvii.

<sup>11</sup> Timothy J. Dallen dan Cevat Tosun, "Arguments for Community Participation in the Tourism Development Process", *Journal of Tourism Studies* 14:2 (February 2003), pp. 2-15.

<sup>12</sup> Benediktus Denar, "Jejak Kolonialistik Pariwisata Super Premium dan Peran Publik Teologi di Keuskupan Ruteng", dalam F. X. E. Armanda Riyanto, (ed.), *Teologi Publik-Sayap Metodologi dan Praksis* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), hlm. 246.

<sup>13</sup> Floresa dan Project Multatuli, “Saudara Kembar Komodo Yang Menolak Dipinggirkan Korporasi Bisnis Pariwisata”, dalam *Floresa.co*, 2023, <https://floresa.co/2022/11/10/saudara-kembar-komodo-yang-menolak-dipinggirkan-korporasi-bisnis-pariwisata/>, diakses 29 November 2023.

<sup>14</sup> Vinka Alysia, "Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Ketahanan Ekonomi Lokal (Studi Literatur Pada Destinasi Wisata Labuan Bajo)", *Journals of Economics Development Issue (JEDI)*, 5:1, (Surabaya: Juni 2022), hlm. 549-60.

mengonversi ratusan hektare wilayah di Pulau Tatawa, Pulau Padar, Pulau Rinca dan Pulau Komodo ke dalam zona pemanfaatan wisata daratan. Keputusan tersebut diikuti dengan pemberian izin konsesi bisnis bagi perusahaan-perusahaan swasta.<sup>15</sup> Masyarakat lokal di Pulau Komodo yang telah bertahun-tahun berprofesi sebagai nelayan terpaksa menyesuaikan diri dengan bekerja di sektor pariwisata. Padahal, mereka tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk bekerja di sektor tersebut. Konsekuensinya, mereka tidak bisa bersaing dengan sejumlah tenaga kerja terampil dari luar pulau Komodo yang telah menyelesaikan pendidikan khusus di bidang kepariwisataan.

Dalam rangka memuluskan agenda wisata super premium, Presiden membentuk Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPO-LBF). Lembaga ini dikukuhkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32/2018 dengan tugas menyukseskan dan mempercepat investasi pariwisata di Flores. Salah satu program unggulan BPO-LBF ialah mengalihfungsikan 400 hektare hutan Bowosie di Labuan Bajo menjadi kawasan bisnis pariwisata dan lokasi proyek persemaian pohon. Hutan Bowosie merupakan kawasan hutan alami yang memiliki 14 sumber mata air.<sup>16</sup> Warga lokal menolak proyek ini karena memperparah konflik agraria dan ketidakadilan kepemilikan tanah di Labuan Bajo.<sup>17</sup>

Berdasarkan informasi dari Dirut BPO-LBF Shana Fatina, hutan Bowosie seluas 400 hektar tersebut akan dibagi dalam empat zona yaitu *cultural district*, *adventure district*, *wildlife district* dan *leisure district*. Menurut Shana, pembangunan di Bowosie akan mempertimbangkan keseimbangan ekologis dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan (*sustaining environment*). Prinsip keberlanjutan lingkungan inilah yang menjadi logika dasar korporasi dan cenderung bersifat destruktif. Belum lama setelah pencaplokan 400

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Jefri Dain, "Polemik Hutan Bowosie Di Labuan Bajo: Serikat Petani Indonesia Ikut Klaim Lahan di Tengah Alih Fungsi oleh Pemerintah untuk Proyek Pariwisata", dalam *Floresa.co*, September 2022, <https://www.floresa.co/2022/09/30/polemik-hutan-bowosie-di-labuan-bajo-serikat-petani-indonesia-ikut-klaim-lahan-di-tengah-langkah-alih-fungsi-oleh-pemerintah-untuk-proyek-pariwisata>, diakses pada 29 November 2022.

<sup>17</sup> Tim Redaksi Floresa, "Dari Relokasi Warga hingga Kenaikan Tarif Masuk: Kontroversi-Kontroversi Gubernur Laiskodat Di TN Komodo", dalam *Sunspirit for Justice and Peace*, 2023, <https://sunspiritforjusticeandpeace.org/2022/12/07/dari-relokasi-warga-hingga-kenaikan-drastis-tarif-masuk-kontroversi-kontroversi-gubernur-laiskodat-di-tn-komodo/2094/>, diakses pada 29 November 2023.

hektare kawasan hutan Bowosie, masyarakat Labuan Bajo mengalami musibah banjir pada 4 April 2023.

Selain itu, Stroma Cole dalam penelitiannya menunjukkan perkembangan pariwisata telah secara dramatis meningkatkan biaya hidup warga Labuan Bajo, terutama karena terjadi komersialisasi dan ketidakadilan dalam distribusi air.<sup>18</sup> Krisis air ini tidak lain disebabkan karena gagalnya pemerintah dalam mengurus pengelolaan air untuk masyarakat. Krisis air ini juga karena proyek privatisasi air minum untuk kepentingan hotel-hotel di Labuan Bajo. Bentuk kapitalisasi air ini tampak dalam penguasaan sumber-sumber air oleh sekelompok kecil pengusaha dan kelompok pebisnis lokal yang memperdagangkan air kepada masyarakat dengan harga yang mahal. Penguasaan air ini tidak saja berdasarkan klaim kepemilikan pribadi tetapi juga melalui mekanisme pencurian dan pengrusakan sumber daya air maupun pipa-pipa milik Perumda Wae Mbeliling.<sup>19</sup>

Model pengelolaan pariwisata yang memarginalisasi masyarakat lokal, memprivatisasi aset publik dan mendorong deforestasi hutan ialah karakter dasar neoliberalisme. Prinsip dasar neoliberalisme yang mengejar pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada rusaknya martabat masyarakat lokal. Ketidakadilan akses ke sumber-sumber ekonomi strategis, makin meredupnya praktik hidup dan nilai-nilai kultural, serta makin masifnya pengerusakan lingkungan membuat warga lokal makin merasakan martabatnya tidak dipedulikan atas nama kemajuan pariwisata super premium yang pada akhirnya menguntungkan kelas penguasa dan korporasi.<sup>20</sup> Hal ini membenarkan pernyataan Donella Meadows dan rekan-rekan penulisnya dalam *The Limits of Growth: The 30 Year Update*. Menurut Donella, jika tujuan tersirat sebuah proyek pembangunan adalah mengeksploitasi alam, memperkaya elite dan mengabaikan jangka panjang maka model pembangunan tersebut akan mengembangkan teknologi dan pasar yang merusak lingkungan, memperlebar kesenjangan kaya-miskin, mengoptimalkan perolehan jangka

---

<sup>18</sup> Strome Cole, "Water Worries: An Intersectional Feminist Political Ecology of Tourism and Water in Labuan Bajo, Indonesia", in *Annals of Tourism Research* 67 (United Kingdom: November 2017), pp. 14-24.

<sup>19</sup> Gregorius Afioma, "Pencaplokan dan Ketidakadilan Pariwisata", dalam C.P. Dale, (ed.), *Pariwisata, Pembangunan dan Keadilan Agraria di Flores* (Watu Langkas: Sunspirit for Justice and Peace, 2016), hlm. 29.

<sup>20</sup> Benediktur Denar, *op.cit.*, hlm. 250.

pendek.<sup>21</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa pariwisata tidak menjadi jalan perubahan nasib masyarakat lokal, tetapi justru berwajah oligarkis-kapitalis yang berwujud lewat upaya privatisasi dan pencaplokan sumber daya publik (*resources grabbing*).<sup>22</sup> Masyarakat lokal menjadi orang asing di tanah sendiri.

Di tengah laju perkembangan industri pariwisata super premium di Labuan Bajo, Gereja Keuskupan Ruteng menetapkan tahun 2022 sebagai tahun pariwisata holistik. Penetapan kebijakan tahun pariwisata holistik ini berlangsung dalam sidang Pastoral Post Natal 4-7 Januari 2022 di Rumah Retret Putri Karmel Wae Lengkas, Ruteng. Konsep pariwisata holistik ini memiliki karakteristik pembangunan pariwisata yang partisipatif, berbudaya dan berkelanjutan. Berpartisipasi berarti masyarakat lokal terlibat aktif dalam merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan pariwisata. Berbudaya berarti mengapresiasi kearifan lokal secara inklusif dan membangun dialog dengan budaya lain. Aspek yang terakhir yaitu berkelanjutan berarti pengelolaan pariwisata perlu memperhatikan keseimbangan ekologi, sebab bumi adalah rumah kita bersama. Khazanah gagasan pariwisata holistik ini bersumber dari sejumlah dokumen penting Gereja Katolik, seperti Ajaran Sosial Gereja yang secara khusus membahas isu pariwisata yaitu *Peregrinans in Terra* dan *Laudato Si*, ensiklik Paus Fransiskus yang berbicara tentang keberpihakan Gereja pada masalah lingkungan.

Namun, konsep pariwisata holistik yang telah digagas oleh Gereja Keuskupan Ruteng belum menyentuh aspek terdalam dari keterlibatan Gereja yaitu pembebasan. Gereja Keuskupan Ruteng belum menjadi Gereja yang membebaskan sebab narasi partisipasi, berbudaya dan berkelanjutan belum diimplementasikan secara nyata dalam usaha advokasi terhadap rakyat yang menjadi korban kebijakan pariwisata. Konsep berkelanjutan dalam wisata holistik masih melanggengkan keberlanjutan pembangunan. Padahal, aspek penting dari keberlanjutan adalah manusia sendiri. Leonardo Boff sudah sejak lama mengingatkan bahwa *sustaining environtment* berpotensi melanjutkan eksploitasi alam atas nama pembangunan. Yang manusia butuhkan bukanlah *sustainable environtment*, melainkan *sustainable society*, yaitu membangun masyarakat yang berkeadilan. Dengan kata lain, tanpa

---

<sup>21</sup> Dennis Meadows Donella Meadows, Jorgen Randers, *Limits to Growth: The Thirty Year Update* (White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing, 2004), pp. 223-24.

<sup>22</sup> Gregorius Afioma, *op.cit.*, hlm. 5-12.

keadilan, masyarakat tidak mungkin berkelanjutan (*sustain*) sebab manusia dengan sendirinya menjadi rentan dan mudah pecah (*fragile*).<sup>23</sup>

Konsep pariwisata holistik di Keuskupan Ruteng tidak dibarengi dengan gerakan holistik yang membebaskan masyarakat dari belenggu pembangunan. Ada dua indikasi penting. *Pertama*, Gereja Keuskupan Ruteng tidak mengkritisi pengalihfungsian 400 hektare hutan Bowosie menjadi kawasan bisnis wisata. Ketika rakyat melawan ketidakadilan ini, Gereja Keuskupan Ruteng sibuk dengan Festival Golo Koe<sup>24</sup> dan Festival Golo Curu. *Kedua*, Gereja Keuskupan Ruteng mendukung proyek Geotermal Wae Sano. Hal ini menjadi kabar menyedihkan, sebab warga lokal di Wae Sano telah menolak pengembangan proyek ini. Dalam proyek geotermal di Wae Sano, Keuskupan Ruteng, dalam hal ini Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat dinilai bersikap tidak konsisten.<sup>25</sup>

Dua peristiwa di atas mengindikasikan bahwa Gereja Keuskupan Ruteng belum menjadi gereja yang membebaskan. Menurut Alexander Jebadu, kehadiran Gereja di dunia pada dasarnya membebaskan umat dari ketertindasan dari aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan rohani. Misi pembebasan Gereja pertama-tama untuk orang-orang miskin dan mengutuk penyebab-penyebabnya seperti struktur sosial-ekonomi dan politik yang tidak adil sudah berusia setua Gereja itu sendiri. Misi pembebasan itu memiliki dasar biblis yaitu pembebasan oleh Allah sendiri dalam Perjanjian Lama dan pembebasan yang dilakukan Yesus dalam Perjanjian Baru.<sup>26</sup> Misi pembebasan Gereja berkisar pada dua opsi untuk memihak masyarakat miskin dan opsi untuk menjaga keutuhan alam ciptaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Gereja menggarisbawahi bahwa kedua opsi ini merupakan aspek

---

<sup>23</sup> Leonardo Boff, *Cry of the Earth, Cry of the Poor* (Maryknoll: Orbis Books, 1997), p. 87.

<sup>24</sup> Gereja Keuskupan Ruteng dalam kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Badan Pelaksana Otorita-Labuan Bajo, Flores (BPO-LBF) menyelenggarakan Festival Golo Koe Maria Assunta di kawasan Marina Waterfront City Labuan Bajo. Acara ini diikuti oleh 1.500 peserta dari 86 komunitas dan lembaga di Keuskupan Ruteng serta 152 UMKM dari tiga Kabupaten, yakni Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur.

<sup>25</sup> Lihat surat Rekomendasi Gereja Katolik Keuskupan Ruteng tentang Penghentian Eksplorasi dan Eksploitasi Proyek Panas Bumi di Desa Wae Sano Kecamatan Sano Nggoang.

<sup>26</sup> Aleksander Jebadu, *Dalam Moncong Neoliberalisme-Kritik Kenabian terhadap Penyelewengan Pembangunan dengan Sistem Ekonomi Pasar Bebas tanpa Kendali Era Otonomi Daerah di Indonesia* (Mauwere: Ledalero, 2020), hlm. 204.



konstitutif dari karya penginjilan dan merupakan kelanjutan dari misi penyelamatan oleh Allah sendiri.<sup>27</sup>

Keberpihakan Gereja Keuskupan Ruteng dalam masalah-masalah di Manggarai sebenarnya implementasi dari gerakan pembebasan yang telah dilakukan Allah dalam Perjanjian Lama dan gerakan Yesus dalam Perjanjian Baru. Selain itu, keberpihakan terhadap orang-orang kecil yang menjadi korban juga menjadi buah dari seruan kritis Gereja. Gereja Keuskupan Ruteng tidak boleh diam ketika hak rakyat kecil diabrak-abrik oleh korporasi atas nama pembangunan. Gereja Keuskupan Ruteng perlu membangkitkan kembali spirit pembebasan sebab pembebasan menjadi bagian dari hidup menggereja. Praksis pembebasan ini berorientasi pada keteladanan pembebasan yang telah dilakukan Yesus.<sup>28</sup> Gereja Keuskupan Ruteng harus peka terhadap isu-isu perampasan 400 hektare di Bowosie. Gereja harus menjadi garam dan terang dengan berjuang bersama rakyat yang menjadi korban.

Esensi dasar dari gereja adalah tindakan pembebasan. Sebagai perpanjangan tangan Kristus, Gereja hadir sebagai “pembebas” umat Allah. Gereja mencari pembebasan semua orang secara integral. Manusia dibebaskan dari berbagai tekanan dan penindasan struktural yang merugikan. Pembebasan manusia adalah pembebasan yang bersifat holistik mencakup aspek sosial, politik, ekonomi dan rohani.<sup>29</sup> Esensi dasar teologi pembebasan ialah memerdekakan rakyat dari pelbagai belenggu pembangunan yang merampas tatanan hidup masyarakat kecil. Teologi pembebasan hadir untuk membela hak-hak rakyat kecil yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi dan politik.

Oleh karena itu, Gereja Keuskupan Ruteng perlu membangkitkan kembali narasi teologi pembebasan. Spirit teologi pembebasan sebenarnya bukan anti-pembangunan. Teologi pembebasan menginspirasi Gereja untuk melawan hegemoni investasi yaitu cara pandang tunggal satu arah pembangunan ekonomi dalam bentuk investasi yang seolah-olah menjadi jalan keluar terhadap semua

---

<sup>27</sup> Alexander Jebadu, "Kritik Kenabian Gereja terhadap Pembangunan Model Kapitalistik", dalam Mathias Daven dan George Kirchberger, (ed.), *Hidup Sebuah Pertanyaan-Kenangan 50 Tahun STFK Ledalero* (Mauwere: Ledalero, 2019), hlm. 338.

<sup>28</sup> Fajar Gumelar dan Hengky Wijaya, "Peran Gereja Masa Kini Menyikapi Teologi Pembebasan Gutiérrez", *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2:1 (Toraja: Juni 2019), hlm. 14-26.

<sup>29</sup> Wiliam Chang, *Berteologi Pembebasan* (Jakarta: Obor, 2005), hlm. 72.

persoalan kehidupan. Dalam cara pandang tunggal pembangunan ini, dimensi pokok lain seperti pembangunan sosial, pembangunan budaya, pembangunan politik dan pembangunan ekologi seringkali dipinggirkan.<sup>30</sup>

Teologi Pembebasan adalah suatu pemikiran teologis yang muncul di Amerika Latin dan negara-negara dunia ketiga, sekaligus merupakan suatu pendekatan baru yang radikal terhadap tugas teologi dengan bertitik tolak pada pengalaman kaum miskin dan tertindas serta perjuangan mereka untuk pembebasan. Allah, yang diyakini oleh teologi, yakni hadir di dalam diri orang-orang miskin dan tertindas. Maka berteologi dalam konteks Amerika Latin berarti berteologi bersama dan dengan orang miskin.<sup>31</sup> Dalam gerakan sosial ini, spirit dasar teologi pembebasan adalah mengkontekstualisasikan ajaran Katolik dalam bidang politik, agama, dan budaya.<sup>32</sup>

Konsep teologi pembebasan ini menempatkan rakyat sebagai subjek berteologi. Dalam bahasa Manggarai, istilah rakyat dikenal dengan nama “*roéng*”. *Roéng* artinya rakyat kecil. Dalam konteks hidup orang Manggarai, terdapat struktur sosial atau patronase yang kuat yakni *tuang* (pemimpin agama dan pemerintah) dan *roéng* (rakyat kecil). Istilah *tuang* memiliki dua jenis, *tuang pemerenta* (Gubernur, Bupati dan pejabat ASN) dan *tuang Gereja* (Uskup dan Imam).<sup>33</sup> Selama ini, politik dan pembangunan adalah urusan *tuang pemerenta* dan *tuang Gereja*, sementara di pihak lain, *roeng* tinggal menunggu dan menikmati proyek-proyek tersebut. Dalam konteks ini pula, pembangunan selalu berarti pembangunan infrastruktur. *Roéng* memahami pembangunan sebagai paket-paket proyek fisik padat karya dalam mana mereka terlibat bekerja sekaligus hasilnya dapat dilihat kasat mata seperti gedung sekolah, jalan raya dan bendungan

---

<sup>30</sup> Ransis Raenputra, "Melawan Pembangunan Yang Eksploitatif, Mempertahankan Eksistensi", dalam *Floresa.co*, 2023, <https://floresa.co/2023/02/22/melawan-pembangunan-yang-eksploitatif-mempertahankan-eksistensi/>, diakses pada 30 November 2023.

<sup>31</sup> Robert Minsel, "Teologi Pembebasan: Antara Refleksi Iman dan Gerakan Sosial (Mengenang 40 Tahun Teologi Pembebasan)", *Jurnal Ledalero* 6:2 (Ledalero: Desember 2007), hlm. 231-34.

<sup>32</sup> Christian Smith, *The Emergence of Liberation Theology. Radical Religion and Social Movement Theory* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1991), p. 75.

<sup>33</sup> Pada tahun 2011, Fransiskus Agustinus Jalong telah membuat tesis tentang genealogi patronase di Manggarai. Menurut Jalong, praktik patronase diproduksi oleh dua sektor penting yaitu Gereja (Kairos) dan pemerintah (developmentalisme). Melalui kedua institusi ini, *roeng* (rakyat) kehilangan otonomi dan subjek otonom. *Roeng* menjadi sasaran kebijakan Gereja dan negara atas nama pembangunan dan keselamatan jiwa-jiwa. Kajian lebih lengkap dapat dibaca dalam Fransiskus Agustinus Jalong, "Kairos Dan Developmentalisme: Politik Wacana Patronase di Manggarai" (Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011), hlm. 20–138.

skala kecil—untuk menyebut sejumlah contoh. Ini yang dijanjikan patron dan diinginkan klien.

Model relasi patron-klien masih kuat dalam budaya Manggarai. Hal ini menyebabkan *roéng* tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan. *Roéng* hanya menjadi objek pembangunan dan objek eksploitasi atas nama konservasi dan investasi. Dalam spirit teologi pembebasan, teologi *roéng* menjadi sebuah model teologi yang bersumber dari rakyat kecil yang miskin dan menjadi korban pembangunan sekaligus sebuah model teologi yang berpihak pada rakyat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengkaji wisata super premium dari perspektif teologi pembebasan dalam sebuah tesis dengan judul **“Teologi *Roéng* sebagai Model Teologi Pembebasan dalam Pembangunan Pariwisata Super Premium Labuan Bajo – Kabupaten Manggarai Barat”**.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Pembangunan pariwisata Labuan Bajo berwatak neoliberal. Aset-aset publik diprivatisasi untuk kepentingan korporasi. Alih-alih konservasi, sejumlah investasi telah memarginalisasi dan mengeksklusi warga lokal. Kebijakan pembangunan tidak mempertimbangkan keberlanjutan ekologis. Sejumlah peneliti telah menganalisis persoalan ini dari perspektif ekonomi politik, sosiologi dan psikologi. Dalam riset ini, penulis menawarkan sebuah model perspektif teologi pembebasan. Penulis mengonstruksi teologi *roéng* sebagai teologi pembebasan dalam pembangunan super premium Labuan Bajo. Perspektif ini memiliki nilai teologis dan berdimensi transformatif.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam riset ini ialah sejauh mana teologi *roéng* berkontribusi dalam usaha membebaskan orang miskin dalam pembangunan pariwisata super premium Labuan Bajo? Dalam tesis ini, pembangunan pariwisata super premium tidak berdimensi pembebasan. Pembangunan telah menghancurkan keseimbangan ekologis, merusak tatanan kehidupan sosial dan merampas hak-hak masyarakat lokal. Teologi *roéng* menjadi sebuah model teologi transformatif dan progresif. Rumusan masalah dalam riset ini akan dijabarkan dalam tiga pertanyaan turunan, antara lain:

1. Bagaimana problem pembangunan pariwisata super premium Labuan Bajo?

2. Bagaimana merumuskan teologi *roéng* sebagai teologi pembebasan di Manggarai?
3. Bagaimana peran teologi *roéng* sebagai model teologi pembebasan dalam usaha membebaskan masyarakat miskin dalam pembangunan pariwisata super premium Labuan Bajo?

### 1.3 STUDI LITERATUR

Studi tentang pembangunan dan pariwisata telah banyak ditulis oleh para peneliti Indonesia maupun peneliti luar negeri. Andreas Neef dalam risetnya *Tourism, Land Grabs and Displacement* menggambarkan secara komprehensif beragam efek pariwisata dan pembangunan. Secara positif, pariwisata seringkali digambarkan sebagai suatu kegiatan yang memberikan manfaat yang sangat besar bagi negara tuan rumah dan masyarakat lokal dalam bentuk lapangan kerja, devisa negara, pelestarian warisan alam dan budaya, serta pertukaran antar budaya. Walaupun demikian, pariwisata juga memainkan peran besar dalam perampasan dan pengusiran masyarakat adat, etnis minoritas dan masyarakat miskin perkotaan, konflik sumber daya yang mengakar, perusakan ekologi, dan kesenjangan sosio-ekonomi di banyak negara tuan rumah.<sup>34</sup>

Analisis Andreas Neef berfokus pada beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Myanmar, Indonesia dan India. Kompleksitas persoalan pariwisata dan pembangunan mulai dirasakan di Labuan Bajo. Sejumlah ahli mulai meneliti hubungan pariwisata dan pembangunan dalam konteks perkembangan pariwisata di Labuan Bajo karena pemerintah Manggarai Barat telah mempromosikan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam pembangunan. Hal ini menjadi sangat menonjol karena antara lain pengakuan Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia pada tahun 2012 dan penetapan pemerintah terhadap Labuan Bajo sebagai salah satu daerah pariwisata super prioritas. Sektor pariwisata diklaim ramah lingkungan, mengangkat nilai-nilai budaya lokal dan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

---

<sup>34</sup> Andreas Neef, *Tourism, Land Grabs and Displacement – The Darker Side of the Feel-Good Industry* (London & New York: Routledge, 2021), pp. 1-15.

Namun, sejumlah riset membuktikan bahwa alih-alih memberikan pemberdayaan ekonomi lokal, sektor pariwisata membuka jalan bagi perluasan model ekonomi neoliberal di negara-negara Dunia Ketiga. Pariwisata tidak memberdayakan masyarakat lokal, tetapi mengakibatkan eksploitasi masyarakat lokal. Maribeth Erb dalam risetnya *Sailing to Komodo: Contradiction of Tourism and Development in Eastern Indonesia* menunjukkan marginalisasi masyarakat lokal di sektor pariwisata.<sup>35</sup> Cypri Jehan Paju Dale dalam bukunya *Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik* menjelaskan lebih mendetail ironi perkembangan pariwisata di Labuan Bajo. Ia merangkum pengabaian masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Alih-alih mengentaskan kemiskinan, pariwisata menjadi medan kuasa pemiskinan sistemik dan perampasan lahan-lahan masyarakat.<sup>36</sup> Dengan menggunakan konsep *Govermentalitas* Foucault, Agustinus Djalong telah menjelaskan peran *tuang* sebagai kelas penguasa dan *roéng* sebagai subjek yang didepolitisasi. Menurut Djalong, kedua subjek tersebut sudah lama terpelihara dalam wacana hegemonik developmentalisme.<sup>37</sup>

Peneliti lain, Venansius Harianto dalam risetnya, *Jejak Neoliberal dalam Pembangunan Pariwisata di Manggarai Barat – Flores*, menjelaskan bahwa pariwisata Labuan Bajo berwatak neoliberal. Dalam sistem neoliberal ini, terdapat dua aliran pemikiran mengenai peran negara. Pertama, aliran ekonomi politik klasik. Dalam aliran pemikiran ini, negara dan pasar memiliki garis demarkasi yang tegas untuk mengelola kepentingan ekonomi. Dominasi pasar dalam urusan ekonomi dan pembangunan telah mengurangi peran negara untuk menjamin kesejahteraan bagi setiap warga masyarakat. Kedua, dominasi negara. Dalam aliran kedua ini, negara memiliki peran dominan untuk mengadopsi kebijakan neoliberal dalam pengelolaan ekonomi dan pembangunan. Model pembangunan dalam

---

<sup>35</sup> Maribeth Erb, "Sailing to Komodo: Contradictions of Tourism and Development in Eastern Indonesia", *ASEAS – Austrian Journal of South-East Asian Studies* 8:2 (Australia: Desember 2015), pp. 43-64.

<sup>36</sup> Cypri Jehan Paju Dale, *Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik-Analisis Kontra Hegemoni dengan Fokus Studi Kasus di Manggarai Raya, NTT, Indonesia* (Labuan Bajo: Sunspirit's Book, 2013), hlm. 14.

<sup>37</sup> Fransiskus Agustinus Jalong, *op.cit.*, hlm. 23-50.

pariwisata super premium di Labuan Bajo menunjukkan dominasi peran negara sebagai aktor utama dalam pembangunan yang berwatak neoliberal.<sup>38</sup>

Sejumlah studi di atas sebagian besar menganalisis tema ekologi dan turisme dari perspektif ekonomi-politik, sosial dan kebudayaan. Kekurangan kajian di atas adalah tidak ada sebuah solusi permanen dari masalah ekologi dan pemiskinan terhadap warga masyarakat lokal penguasa bekerja sama dengan pengusaha dalam melanggeng bisnis di Labuan. Salah satu kekuatan besar yang berdaya transformatif di Flores dan Labuan pada khususnya adalah Gereja Katolik. Benediktus Denar telah membuat riset tentang *Jejak Kolonialistik Pariwisata Super Premium dan Peran Publik Teologi di Keuskupan Ruteng*. Menurut Denar, teologi publik memiliki peran dalam menyelesaikan persoalan pariwisata di Labuan Bajo.<sup>39</sup> Analisis Denar ini membantu penulis dalam membaca masalah pariwisata dari perspektif teologi. Namun, analisis Denar masih bersifat abstrak dan belum berdimensi pembebasan.

Oleh karena itu, penulis ingin menawarkan sebuah refleksi teologi berdimensi pembebasan dalam sebuah riset tentang teologi *roéng*. Tema ini belum pernah dianalisis oleh peneliti sebelumnya. Teologi *roéng* menjadi sebuah model teologi pembebasan di Manggarai. Berbeda dengan analisis Denar yang terbatas pada refleksi saja, teologi *roéng* berdimensi transformatif dengan upaya praksis sesuai dengan arah dasar gerakan teologi pembebasan di Amerika Latin. Salah satu kebaruan dari analisis ini adalah perspektif teologi pembebasan Leonardo Boff dan Gustavo Gutiérrez bagi Gereja Keuskupan Ruteng dalam menganalisis pariwisata super premium di Labuan Bajo. Teologi *roéng* menjadi sebuah alternatif gerakan kiri progresif dalam Gereja berhadapan dengan persoalan pembangunan pariwisata super premium Labuan Bajo.

---

<sup>38</sup> Venansius Harianto, "Jejak Neoliberal dalam Pembangunan Pariwisata di Manggarai Barat-Flores", dalam *Sunspiritforjusticeandpeace.org*, March 2, 2018, <https://sunspiritforjusticeandpeace.org/tag/sunspirit-for-justice-and-peace-research-and-publication/>, diakses pada 30 November 2023.

<sup>39</sup> Benediktus Denar, *Jejak Kolonialistik Pariwisata Super Premium dan Peran Publik Teologi di Keuskupan Ruteng*, *op.cit.*, hlm. 256-257.

## 1.4 KERANGKA TEORI

### 1.4.1 Analisis Kuasa dan Kepengaturan

Kajian kebijakan pembangunan pariwisata dalam tesis ini menggunakan perspektif Michel Foucault tentang kuasa/pengetahuan (*power/knowledge*), kepengaturan (*governmentality*) dan dalam hubungan dengan hal tersebut berimplikasi pada dominasi dan penaklukan (*domination and subjection*). Kekuasaan menurut Foucault tidak dipahami sebagai sebuah kepemilikan pada kelompok tertentu untuk menjamin kepatuhan warga negara terhadap otoritas negara.<sup>40</sup> Kekuasaan dalam pandangan Foucault berbeda dengan konsep kuasa konvensional yang dimiliki negara melalui prosedur pemilihan secara demokratis. Kekuasaan juga bukanlah sebuah posisi jabatan yang dimiliki secara periodik dalam diri legislatif atau eksekutif yang seringkali diperebutkan dalam kontestasi pemilu. Melampaui semua itu, kuasa menurut Foucault berhubungan dengan pendisiplinan atau dalam bahasa Foucault sebagai *disciplinary power* dan *bio-power* yang tampak melalui pendisiplinan dan kontrol atas kehidupan masyarakat. Model kekuasaan pendisiplinan ini berimplikasi pada terbentuknya masyarakat yang ternormalisasi (*a society of normalization*) yang tidak saja diatur dalam tata terbit hukum, tetapi lewat peraturan, institusi dan kebijakan sains yang melahirkan regulasi koersif dalam bentuk pendisiplinan.<sup>41</sup>

Kuasa disiplin Foucault akan menjadi semakin jelas kalau kita memahami gagasannya tentang kepengaturan (*governmentality*). Kepengaturan dipahami sebagai bentuk implementasi *disciplinary power*. Jika objek *disciplinary power* adalah tubuh individu, maka subjek kepengaturan adalah populasi (tubuh sosial). Bentuk pengetahuan dalam model *disciplinary power* berupa rezim kebenaran, sedangkan pada kepengaturan berupa politik ekonomi. Oleh karena itu, kepengaturan adalah perluasan model kekuasaan *disciplinary power* pada level negara, maka yang dibicarakan dalam kepengaturan ialah tentang keamanan dan teritorial suatu negara dalam usaha mengontrol dan mengendalikan sumber daya

---

<sup>40</sup> Michel Foucault, *The History of Sexuality: An Introduction* (New York: Vintage Books, 1990), pp. 92-93.

<sup>41</sup> Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* (New York: Pantheon Books, 1980), p. 106.

dan populasi negara.<sup>42</sup> Kepengaturan itu bekerja melalui institusi, aturan-aturan, hukum, kebiasaan, kepercayaan, klaim keilmuan, dll yang pada intinya mengarahkan perilaku dan pola pikir masyarakat untuk tunduk pada kepengaturan tersebut.

Kepengaturan ini seringkali terjalin bersamaan dengan kuasa koersif pemerintah dengan pendekatan kekerasan dan melalui pendisiplinan (peraturan, kebiasaan, hukuman dan hadiah). Penyiksaan tampak dalam perlakuan terhadap individu yang bergerak di luar regulasi kepengaturan. Menurut Foucault, dominasi dan penaklukan tidak saja dilakukan dengan cara-cara koersif atau pendekatan kekerasan, tetapi lewat pengarahannya yang membuat yang berkuasa itu menunduk dan mengarahkan tindakannya untuk dikuasai secara sukarela tanpa perlawanan.

Kepengaturan ini menjadi model analisis dalam proses pembangunan pariwisata super premium Labuan Bajo. Selain menggunakan kuasa koersif terhadap warga yang menolak metanarasi kebijakan pembangunan, kepengaturan tampak dalam institusi, regulasi, kebiasaan, pengetahuan dan prosedur-prosedur legitim untuk mengarahkan pola pikir masyarakat. Alih-alih mendorong perkembangan ekonomi melalui program pembangunan neoliberal, pariwisata menjadi media dominasi dan marginalisasi masyarakat lokal dari tanah air mereka sendiri.

#### 1.4.2 Patronase

Sistem patronase menjadi tema yang banyak dikaji di sejumlah negara dengan sistem patriarki yang kental.<sup>43</sup> Indonesia menjadi salah satu negara dengan sistem patriarki yang kuat baik dalam pendidikan, politik maupun budaya. Menurut James C. Scoot, patronase atau hubungan patron-klien adalah jalinan relasi antara satu orang dengan orang lain yang dibuat atas prinsip ekonomis dan cenderung bersifat sementara. Scoot menjelaskan sejumlah ciri-ciri umum dari patronase antara lain; pertama, ketidakseimbangan hubungan antara patron-klien. Patron

---

<sup>42</sup> Abdil Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Sosiologi Masyarakat* 18:1 (Makasar: Januari 2013), hlm. 75-100.

<sup>43</sup> A Beresford, "Power, Patronage, and Gatekeeper Politics in South Africa", *African Affairs*, 114: 455 (Oxford University Press: April 2015), p. 226.



memiliki dominasi kuasa atas klien karena patron memiliki modal yang diberikan untuk klien dan keluarganya. Kedua, adanya kepercayaan antara patron-klien. Relasi patron-klien bersifat pribadi yang dibuat atas kepercayaan satu sama lain. Ketiga, fleksibilitas. Relasi patron-klien bersifat fleksibel yang mencakup banyak aspek penting dalam kehidupan.<sup>44</sup> Gagasan patronase Scoot ini memiliki sejumlah perbedaan dengan Popkin yang melihat hubungan patron-klien dari perspektif ekonomi-politik. Menurut Popkin, patronase adalah sebuah model eksploitasi patron terhadap petani yang membuat petani sebagai klien mengalami alienasi dan ketertindasan secara ekonomi.<sup>45</sup>

Fenomena patronase tersebut tampak kuat dalam budaya Manggarai. Berbeda dengan pendapat Scoot dan Popkin di atas, patronase di Manggarai menurut Boni Hargens lebih merupakan sistem bosisme atau sistem orang kuat ketimbang patronase kultural.<sup>46</sup> Secara sederhana, Hargens mendefinisikan bosisme sebagai sistem pemusatan kekuasaan sosial, ekonomi, dan politik di tangan satu atau lebih bos yang terbatas yang diikat oleh kepentingan finansial dan kepentingan parsial lainnya. pemusatan kekuasaan berlangsung dalam waktu yang relatif lama karena para bos berupaya menjaga *status quo* mereka dengan memelihara dukungan dari klien sebanyak-banyaknya.<sup>47</sup>

Patronase bercorak bosisme ini tampak dalam patron *tuang pemerenta* dalam budaya Manggarai. *Tuang pemerenta* ini memanfaatkan posisinya dalam dan melalui pemilihan umum untuk menjaga *status quo*. Bosisme dalam diri *tuang pemerenta* ini menjadi semacam rezim penentu sirkulasi kepemimpinan di tingkat lokal. Selain berasal dari keturunan raja, *tuang pemerenta* ini memiliki modal ekonomi, modal sosial dan modal pendidikan untuk menguasai pemerintahan. Berbeda dengan *tuang pemerenta* yang berkuasa dalam bidang tata kelola pemerintahan dan kebijakan pembangunan, *tuang Gereja* mengurus hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan dan ritus-ritus dalam Gereja Katolik. Patron

---

<sup>44</sup> James C Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia", *Jurnal American Political Science Review* 66:1 (Cambridge: August 1972), pp. 91-113.

<sup>45</sup> Samuel L Popkin, *The Rational Peasant; The Political Economy of Rural Society in Vietnam* (Illionis: F Peacock Publisher Inc, 1979), p. 82.

<sup>46</sup> Boni Hargens, "Manggarai, Gereja dan Negara", dalam Max Regus dan Kanisius Teobaldus Deki, (ed.), *Gereja Menyapa Manggarai-Satu Abad Gereja Manggarai-Flores* (Jakarta: Parrhesia Institute, 2011), hlm. 273.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 274.

*tuang Gereja* ini juga memiliki kewibawaan sosial dalam kebijakan pembangunan di Manggarai. Analisis tentang *tuang pemerenta* dan *tuang Gereja* menjadi topik yang penting dalam bab tiga tesis ini.

## **1.5 TUJUAN PENELITIAN**

### **1.5.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini ialah menjawab rumusan masalah dalam tesis, yaitu; pertama, menjelaskan problem pembangunan dalam pariwisata super premium Labuan Bajo; kedua, merumuskan teologi *roéng* dengan perspektif pembebasan; ketiga, menjelaskan peran teologi *roéng* di Keuskupan Ruteng dalam pembangunan pariwisata super premium Labuan Bajo.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

Tujuan akademis penulisan tesis ini mengacu pada visi dan misi program pendidikan pascasarjana teologi Katolik di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero. Bertolak dari visi tersebut, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan magister teologi dan petugas pastoral yang terpercaya dan berintegritas secara intelektual, sosial, dan spiritual. Atas dasar visi tersebut, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar magister teologi kontekstual di IFTK Ledalero.

Bertolak dari misi program pascasarjana, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan berteologi kontekstual dalam diri penulis agar menjadi pribadi yang beriman, integral, kritis dan terbuka serta mampu menjalankan pelayanan pastoral dalam Gereja dan masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, penulis secara khusus mengembangkan dan mengimplementasikan teologi kontekstual berdasarkan permasalahan yang dialami oleh umat.

## **1.6 METODOLOGI PENELITIAN**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Dalam menyusun dan mengerjakan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut John W. Cresswell, penelitian kualitatif adalah

sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data yang biasanya dikumpulkan dalam lingkungan partisipan, analisis data yang dibangun secara induktif dari hal-hal yang bersifat khusus ke tema-tema yang bersifat umum, dan peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel. Mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini mendukung cara pandang terhadap penelitian yang menghargai gaya induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya memberikan gambaran tentang kompleksitas situasi.<sup>48</sup>

John W. Creswell mengelompokan dua model pendekatan dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian naratif dan penelitian fenomenologi. Khusus untuk fenomenologi dibagi lagi dalam tiga model yaitu model dasar (*grounded*), model etnografi (*ethnography*) dan studi kasus (*case study*).<sup>49</sup> Dalam riset ini, penulis menggunakan model studi kasus. Studi kasus adalah sebuah desain penyelidikan yang ditemukan di berbagai bidang, terutama evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam tentang sebuah kasus, seringkali sebuah program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu atau lebih individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan para peneliti mengumpulkan informasi rinci dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan.

### 1.6.2 Sumber Data dan Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dua tema besar. Pertama, pembangunan pariwisata super premium di Labuan Bajo. Analisis pembangunan ini terbatas dalam tiga studi kasus yaitu masalah konservasi Taman Nasional Komodo, pengalihfungsian hutan di Bowosie dan eksplorasi panas bumi di Wae Sano. Untuk mendapatkan data-data tersebut, penulis telah melakukan wawancara mendalam dengan Kadis Pariwisata Manggarai Barat, Direktur BPO-LBF, ketua

---

<sup>48</sup> John W. Creswell, *Research Design-Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (London: Sage Publications Ltd, 2014), p. 32.

<sup>49</sup> *Ibid.*, pp. 40-43.

adat dari Wae Sano, Ketua *Komodo's Community Center* (KCC) di Pulau Komodo, peneliti *Sunspirit for Justice and Peace* Labuan Bajo, pelaku pariwisata, tokoh agama dan tokoh masyarakat Labuan Bajo.

Kedua, konsep *roéng*. Untuk mendapatkan konsep *roéng* yang komprehensif, penulis telah melakukan wawancara dengan para tokoh adat di Wae Rebo, tokoh adat di Niang Todo dan sejumlah budayawan Manggarai antara lain Bapak Antonius Bagul Dagur, Romo Dr. Inosensius Sutam, Dr. Fransiska Widyawati dan Bapak Stanislaus Tatul. Hal ini penting sebab teologi *roéng* adalah tema baru dalam analisis teologi di Manggarai.

Sebagai penunjang data-data riset lapangan, penulis juga menggunakan studi kepustakaan dengan mencari dan mengolah literatur-literatur yang relevan dengan kepentingan penelitian. Literatur itu antara lain buku-buku, ensiklopedia, kamus, jurnal (nasional dan internasional), dokumen-dokumen Gereja, dokumen pemerintah, manuskrip, dokumen hasil penelitian dan media-media *online* yang membahas tentang topik penelitian.

## **1.7 KETERBATASAN STUDI**

Ada dua hal penting yang memberikan batasan dalam tesis ini. Pertama, konsep Gereja. Dalam tesis ini, konsep Gereja lokal hanya merujuk pada tatanan hierarki. Kedua, studi kasus. Dalam tesis ini, penulis menganalisis problem pembangunan dalam pariwisata super premium Labuan Bajo. Persoalan pembangunan dalam pariwisata sangat kompleks. Oleh karena itu, penulis membatasi studi ini pada tiga model studi kasus. Pertama, daya tipu konservasi. Penulis menganalisis bisnis konservasi di Taman Nasional Komodo (TN. Komodo). Kedua, infrastruktur. Penulis menganalisis kasus pengalihfungsian 400 hektare hutan Bowosie sebagai tempat persemaian bibit modern dan tempat wisata internasional. Ketiga, energi. Untuk mendukung ketersediaan energi, investor dan pemerintah melakukan eksplorasi geotermal di Wae Sano. Tiga kasus ini menjadi representasi persoalan pembangunan pariwisata super premium Labuan Bajo.

## 1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini terdiri dari lima Bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, kerangka teori dan penelitian terdahulu tentang pariwisata super premium di Labuan Bajo. Bab II berisi uraian tentang pariwisata super premium Labuan Bajo. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan tentang sejarah Labuan Bajo, konsep pariwisata secara umum dan konsep pariwisata super premium dan konsep pembangunan neoliberalistik dalam pariwisata super premium. Bab III berisi penjelasan tentang teologi *roéng* dalam perspektif teologi pembebasan. Penulis akan menguraikan sejarah *roéng* dalam kolonialisme di Manggarai dan teologi *roéng* sebagai teologi pembebasan di Manggarai. Bab IV berisi uraian tentang teologi *roéng* di Keuskupan Ruteng dan pariwisata super premium. Penulis menghubungkan kedua tema ini. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan secara lengkap teologi *roéng* sebagai sebuah teologi pembebasan dalam hubungan dengan pariwisata super premium Labuan Bajo. Bab VI berisi penutup seluruh uraian tesis ini.